

Judul : Menuju Energi Bersih - Energi Fosil Kini Tidak Lagi Primer
Tanggal : Selasa, 18 Oktober 2022
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 7

Menuju Energi Bersih Energi Fosil Kini Tidak Lagi Primer

SENAYAN mengingatkan para produsen batubara untuk bergerak menuju pembangunan berkelanjutan dan energi bersih serta pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT).

Karena, energi fosil tidak lagi boleh menjadi energi primer langsung bagi kepentingan Indonesia.

Ketua Komisi VII DPR Sugeng Suparwoto mengatakan, Pemerintah saat ini terus berupaya mendorong pengembangan batubara sebagai energi sekunder melalui hilirisasi batubara.

Pemanfaatan energi fosil termasuk batubara tidak lagi menjadi energi primer yang dibakar untuk menggerakkan turbin untuk menghasilkan listrik seperti saat ini.

"Jadi, produsen batubara ke depannya dapat segera mengembangkan sebagai sumber energi bersih," saran politikus NasDem ini.

Sebetulnya, batubara sebagai jenis energi fosil masih dapat dikembangkan menjadi energi bersih apabila dimanfaatkan sebagai energi sekunder. Salah satunya, melalui metode gasifikasi untuk mengolah batubara menjadi Dimethyl Ether (DME).

Kendati demikian, Sugeng tidak memungkiri bahwa potensi cadangan batubara di Indonesia cukup melimpah. Sehingga, negara sangat bergantung pada pemanfaatan sumber daya tersebut untuk memenuhi kebutuhan energi nasional.

"Dari 73 gigawatt (GW) kapasitas pembangkit listrik seluruh Indonesia itu, kurang lebih 62 persennya adalah Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dari batubara," ungkapnya.

Bila dibandingkan dengan energi fosil, tingkat peman-

faatan EBT sebagai sumber energi di Indonesia saat ini masih berbanding terbalik.

"Pemanfaatan EBT sebagai sumber energi pembangkit listrik di Indonesia saat ini masih sangat minim," sebut legislator dari dapil Jawa Tengah (Jateng) VIII itu.

Sugeng melihat, saat ini pemanfaatan EBT sebagai sumber energi utama pembangkit listrik baru mencapai 11,8 sampai 12 persen. Artinya, 88 persennya masih berasal dari energi fosil.

Karenanya, Pemerintah kudu mempercepat transisi energi dari fosil ke EBT. Hal ini sesuai komitmen Pemerintah yang akan mengangkat dan fokus membahas isu tersebut pada Presidensi G20 yang akan dilaksanakan di Bali, November mendatang.

"Kita bersyukur melalui kepemimpinan Indonesia sebagai tuan rumah pada presidensi G20, Pemerintah memberi perhatian lebih terhadap tema transisi energi dari energi fosil ke energi baru terbarukan," imbuhnya.

Sementara, Wakil Ketua Komisi VII DPR Dony Maryadi Oekon meminta Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba) memberikan kejelasan terkait perhitungan Harga Batubara Acuan (HBA).

Perhitungan ini dalam skema pengumpulan dana kompensasi 'Domestic Market Obligation' (DMO) yang rencananya dilakukan Badan Layanan Umum (BLU).

"BLU ini punya standar nantinya. Standar itu dari harga dan pengeluaran yang dilakukan perusahaan penambang sendiri yaitu HBA, ini harus jelas perhitungannya," ujar Dony dalam keterangannya, kemarin. ■ TIF